

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan tentang Pemerintahan Kecamatan

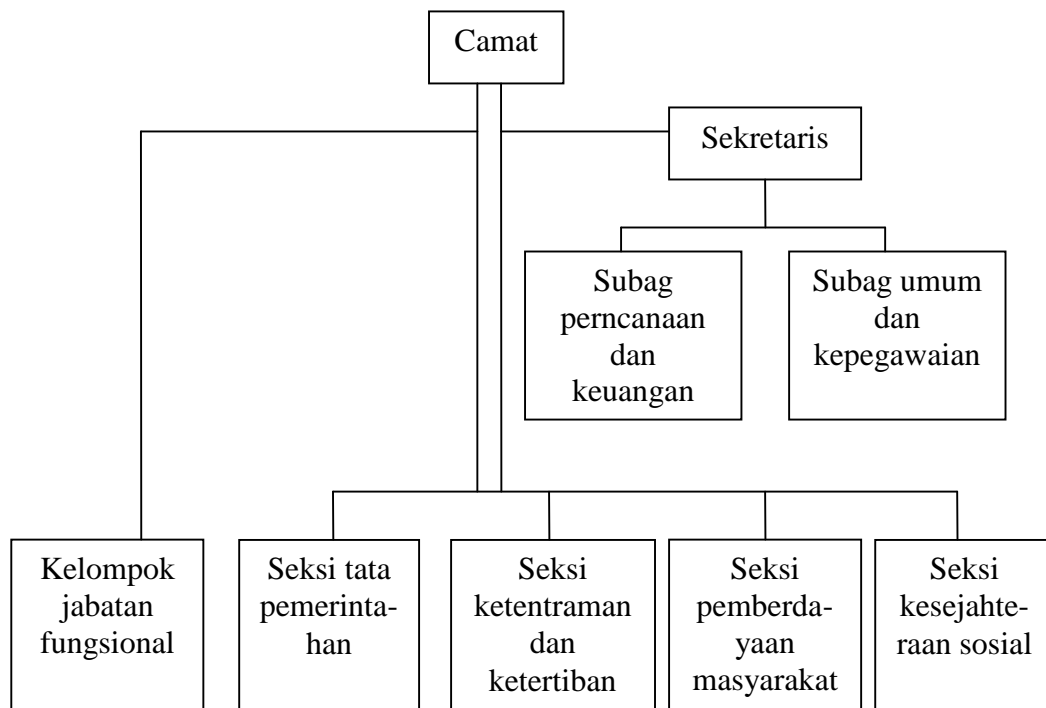
1. Pengertian Pemerintahan Kecamatan

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata (Budiman, 1995: 4).

Kecamatan merupakan *line office* dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan. Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat. Adapun stuktur organisasi yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN

(Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 15 Tahun 2008)



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 15 Tahun 2008

Gambar 1: Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 15 Tahun 2008

2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan perangkat kecamatan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh bupati. Menurut Peraturan Bupati Kebumen No. 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Tugas dan fungsi kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati. Camat dalam menjalankan tugas dan kewajiban dibantu oleh seorang sekretaris kecamatan, kapala seksi, kepala sub bagian dan staf. Untuk menyelenggarakan tugas berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Kebumen No. 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Fungsi Camat. Fungsi camat sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
- g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan.
- h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan.
- j. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
- k. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- l. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya yang berada di wilayahnya.
- m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- n. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan.
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Kebumen No. 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Sekretaris mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan

pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi kecamatan. Untuk melaksanakan tugasnya sekretaris memiliki fungsi. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana.
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi.
- f. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
- g. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya.
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dikecamatan.
- i. Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- j. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- k. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan.
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada bupati.
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Tata Pemerintah

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bupati Kebumen No 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, tata pemerintahan kecamatan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan. Untuk menjalankan tugasnya seksi tata

pemerintahan memiliki fungsi yang sesuai dengan keentuan yang ada. Fungsi seksi tata pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan.
- b. Penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
- c. Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- e. Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan.
- i. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan.
- j. Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan.
- k. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- l. Administrasi desa dan/atau kelurahan;
- m. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau kelurahan beserta perangkat desa dan/atau kelurahan.
- n. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan. dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bupati Kebumen No. 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat.
- b. Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat.
- d. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan.
- e. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
- g. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- h. Koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah.
- i. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Bupati Kebumen No. 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial yaitu:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kesejahteraan sosial.
- b. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan.
- c. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Penanganan bencana alam dan bencana sosial.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya

B. Tinjauan tentang Pembinaan Administrasi Desa Oleh Pemerintahan Kecamatan

1. Pembinaan Administrasi Desa oleh Pemerintah Kecamatan

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, desa adalah subsistem pemerintahan daerah di bawah subsistem pemerintahan nasional. Desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asal usul dan adat istiadat. Untuk menjaga agar penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan desa maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota kepada desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu menciptakan kesejahteraan warganya. Pembinaan administrasi desa adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka menyempurnakan dan memperbaiki penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa agar berjalan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan mencapai tujuan (Hanif Nurcholis, 2011: 154).

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah dan atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah. Koordinasi pembinaan dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional, atau provinsi. Pembinaan tersebut meliputi:

1. koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan.
2. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan.
3. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
4. pendidikan dan pelatihan. dan
5. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.

Upaya pemerintahan kecamatan dalam pembinaan administrasi desa yaitu menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, khususnya camat yang merupakan tangan panjang dari bupati dan perangkatnya untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang administrasi. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya pemerintah kecamatan berpatokan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkaitan dengan kedisiplinan penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur Negara (Hanif Nurcholis, 2007: 231).

Administrasi desa adalah keseluruhan proses pencatatan kegiatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Administrsai desa

sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan desa, agar pemerintahan desa berjalan lancar maka harus didukung oleh sistem tata usaha/administrasi yang benar, rapi dan tertib. Sistem administrasi yang benar, rapi dan tertib dapat memberikan informasi yang mudah sangat berguna untuk mengambil keputusan, perencanaan kontrol dan evaluasi (Hanif Nurcholis, 2011: 154).

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 102, mengisyaratkan bahwa Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan. Pembinaan dan pengawasan tersebut, meliputi :

1. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
2. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa.
3. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
4. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa.
5. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan.
6. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa.
7. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
8. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan.
9. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
10. Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
11. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

12. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga.
13. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan.
14. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

Sehingga dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan perangkat kabupaten dalam pembinaan dan pengawasan kaerena hal tersebut telah dilimpahkan kepada kecamatan.

Semakin meningkatnya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, maka penyelenggaran administrasi pemerintahan pada tingkat desa semakin penting artinya dalam upaya mewujudkan desa yang mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Keberhasilan dalam tugas pemerintah desa dipengaruhi oleh tingkat ketrampilan kepala desa dan perangkatnya untuk itu diperlukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan pemerintahan. Kemampuan uang dimiliki perangkat desa sangat dibutuhkan untuk kelacaran pelaksanaan penyelenggaraan administrasi desa (Hanif Nurcholis dkk, 2010: 5.18).

Kemampuan administrator yang dimiliki oleh perangkat desa menentukan keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu upaya/usaha pemerintah kecamatan dalam pembinaan administrasi desa sangat penting. Dengan pembinaan administrasi akan dapat meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa, karena ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah pada tingkat desa merupakan salah satu butir dan ukuran yang utama dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan. Untuk itu yang sangat diharapkan adalah desa dapat berfungsi dalam kedudukannya sebagai sumber data dan informasi bagi segala kegiatan pemerintahan dan pembangunan (Hanif Nurcholis, 2011: 154).

Dalam penelitian ini hubungan antara upaya pemerintah kecamatan dalam pembinaan administrasi desa dan kemampuan aparat pemerintah desa sangat erat. Karena peran camat sangat dominan, dalam arti bahwa maju mundurnya suatu desa sangat tergantung pada seberapa jauh pemerintah kecamatan melakukan pembinaan ke desa-desa. Dengan dibinanya administrasi desa oleh pemerintah kecamatan melalui instruksi yang diterima dari bupati maka aparat desa akan dapat mengemban tugas dan fungsinya sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 3 Permendagri No. 32 Tahun 2006, tentang Pedoman Administrasi Desa, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, khususnya camat terhadap administrasi pemerintah desa adalah sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi administrasi desa.
- b. Melakukan pengawasan administrasi desa.

- c. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.

2. Pembinaan

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana yang ditetapkan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, *monitoring*, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Di dalam mengadakan pembinaan di desa, pemerintah kecamatan khususnya camat dan perangkatnya tidak hanya terbatas pada hasil yang telah dicapai namun juga agar dapat menumpahkan suatu perkembangan dan peningkatan masyarakat tersebut untuk itu perlu diadakan penyuluhan-penyuluhan agar kreatifitas dari masyarakat itu tumbuh, sehingga masyarakat dapat memperbaiki keadaan dalam kehidupannya yang lebih baik dari sebelumnya.

Pembinaan merupakan tugas yang mendukung karena tujuannya adalah meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan agar makin lama makin baik dari sebelumnya. Pembinaan yang dilakukan mencakup bimbingan, pelatihan dan bantuan. Dalam pelaksanaannya pemerintah kecamatan selalu memberikan pengarahan secara umum baik secara perorangan maupun kelompok dalam memilih cara pemecahan masalah yang dihadapi.

Pembinaan juga diarahkan untuk menciptakan aparat yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan tugas umum, pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya serta dilandasi semangat

dan sikap pengabdian pada masyarakat, Bangsa dan Negara. Dalam pembinaan ini kemampuan aparat pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pembangunan perlu ditingkatkan. Pembinaan, penyempurnaan dan pendaya gunaan perangkat pemerintah baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah perlu dilakukan terus menerus sehingga dapat meningkatkan kemampuan pengabdian, disiplin dan keteladanan.

3. Administrasi

Menurut Sondang P. Siagian (2007: 4) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah kerjasama banyak orang dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Baik buruknya, maju mundurnya sebuah organisasi dapat dilihat dengan melihat administrasi tersebut. Penataan yang baik dari administrasi akan membantu unsur-unsur lain dalam organisasi. Supaya dapat menata dan mengembangkan organisasi.

Menurut The Liang Gie (Inu Kencana Syafiie, 1999: 70-84) unsur-unsur administrasi tersebut sebagai berikut:

a. Organisasi

Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Jadi organisasi cenderung berperan sebagai wadah aktifitas. (Inu Kencana Syafiie, 1999: 70-84)

b. Manajemen

Manajemen adalah proses yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama sekelompok manusia tersebut sehingga tujuan yang ditentukan benar-benar tercapai. (Inu Kencana Syafiie, 1999: 70-84)

c. Tata Hubungan

Tata hubungan adalah proses penyampaian warta dari seseorang ke pihak lain dalam usaha kerjasama. Tata hubungan merupakan urat nadi yang memungkinkan orang-orang dalam suatu kerjasama saling mengetahui, pikiran, kehendak dan perasaan masing-masing. Tanpa adanya hubungan tidak mungkin suatu usaha kerjasama dapat berlangsung (Inu Kencana Syafiie, 1999: 70-84).

d. Kepegawaian/personalia

Kalau dalam instansi atau kantor maka bagian ini akan mengurus kepegawaian/personalia, tetapi dalam organisasi bagian ini akan mengurus staf yang duduk dalam struktur organisasi tersebut. Staf dalam organisasi merupakan sumber daya utama sehingga maju mundurnya sedikit banyak berpengaruh terhadap pemimpin organisasi. Orang kedua organisasi yang berperan sebagai nadi adalah sekretaris, sebab sekretaris akan berkaitan dengan masalah kesekretariatan karena merupakan unit organisasi tempat melakukan serangkaian penataan terhadap administrasi (Inu Kencana Syafiie, 1999: 70-84).

e. Keuangan

Keuangan merupakan proses yang berkenaan dengan penggunaan anggaran organisasi sebagai resiko dari setiap aktifitas. Oleh sebab itu, pengelolaan administrasi dituntut mampu mengelola dana keuangan. (Inu Kencana Syafiie, 1999: 70-84)

f. Perbekalan/fasilitas

Proses yang berkenaan dengan penyediaan dan penggunaan benda-benda/alat kerja dalam usaha kerjasama (Inu Kencana Syafiie, 1999: 70-84).

g. Kesekretariatan

Merupakan proses yang melayani dan membantu penyelenggaraan usaha kerjasama dalam pembuatan, penerimaan dan penyimpanan bahan-bahan keterangan dari sebagian administrasi. Dengan kata lain kesekretariatan adalah sebagai hal yang berhubungan dengan sekretariat. Sekretariat sendiri merupakan suatu organisasi tempat sekretaris dan staf melakukan serangkaian penataan terhadap administrasi. (Inu Kencana Syafiie, 1999: 70-84)

h. Perwakilan

Setiap usaha kerjasama apabila ingin memperoleh sambutan baik dari lingkungan sekelilingnya harus di satu pihak memperkenalkan diri agar mampu merespon hasrat dan suasana masyarakat setempat. Perwakilan merupakan rangkaian kegiatan menciptakan hubungan baik dan dukungan dari masyarakat sekeliling terhadap usaha kerja sama yang bersangkutan. Bentuk pemeliharaan hubungan keluar tidak harus oleh semua anggota yang melakukan kerjasama tetapi cukup diwakili sebagian perwakilan. Perwakilan suatu yang menggambarkan pada pihak luar segala sesuatu yang berlangsung mengenai usaha kerja sama. (Inu Kencana Syafie, 1999: 70-84)

Kedelapan unsur administrasi tersebut tentu terdapat pada setiap usaha kerjasama manusia, terlepas dari tujuan, sifat, waktu dan tempat usaha tersebut. Delapan unsur ini merupakan kebulatan proses penyelenggaraan yang terbentang antara titik ditentukannya suatu tujuan untuk tercapainya tujuan.

4. Pemerintahan Desa

Sejak berlakunya otonomi daerah desa memiliki kewenang sendiri untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Desa bukan merupakan bagian dari perangkat desa dan berbeda dengan kelurahan namun sebuah desa bisa diubah statusnya menjadi kelurahan, namun desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota.

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif homogen terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial-budaya. Mereka bermasyarakat secara rukun dan guyub, karena itu mereka disebut masyarakat paguyuban (Hanif Nurcholis, 2011: 1-2).

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa adalah suatu proses diman usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Maria Eni Surasih 2002: 23).

Otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat adalah otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa. Desa memang mempunyai urusan-urusan yang secara adat diatur dan diurus, maka maka urusan itu diakui oleh undang undang (Hanif Nurcholis, 2007: 234).

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang pengertian desa sebagai berikut:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan bahwa “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Purwo Santoso (2003: 240) pengertian desa adalah wadah kebersamaan masyarakat setempat dalam mengelola kepentingan bersama.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu wilayah tertentu yang mempunyai dasar hukum serta memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Selain itu desa juga mempunyai unsur-unsur sebagaimana halnya sebuah negara. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, unsur-unsur yang ada pada desa sebagai berikut:

a. Wilayah

Pengertian wilayah adalah suatu letak geografis suatu desa yang dalam hal ini desa mempunyai kekuasaan penuh atas daerah dalam garis batas tersebut. Jadi wilayah adalah segala kegiatan pemerintahan desa.

b. Penduduk

Pengertian penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dan mempunyai hubungan secara sah menurut aturan yang ada. Dalam hal untuk dapat disebut sebagai suatu daerah atau desa harus mempunyai penduduk 750 jiwa atau 75 kepala keluarga

c. Pemerintah

Pemerintah berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan desa, segala kegiatan yang dilakukan di desa tersebut dalam hal ini dikoordinir oleh kepala desa.

5. Administrasi Desa

Menurut Sumber Saparin (1997: 46), kegiatan administrasi desa meliputi :

Administrasi dalam arti sempit. Menurut Suwarno Handayani (1988:2) mengatakan administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan. Administrasi dalam arti luas. Menurut The Liang Gie (Inu Kencana Shafie, 1999: 23) mengatakan administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi secara luas dapat disimpulkan pada dasarnya semua mengandung unsur pokok yang sama yaitu adanya kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerjasama serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pendapat lain mengenai administrasi dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (1994:3) mengemukakan administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan uraian dan definisi tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan.

- a. Tugas bidang pemerintahan
 - Pencatatan Register
 - Tugas Umum
- b. Tugas bidang pelayanan umum
- c. Tugas bidang tata usaha
 - Tata Usaha Umum
 - Tata Usaha Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa, standarisasi jenis dan bentuk administrasi pemerintahan terdiri dari empat jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Administrasi Umum
 - Buku Data Peraturan Desa
 - Buku Data Keputusan Kepala Desa
 - Buku Data Aparat Pemerintah Desa
 - Buku Data Inventaris Desa
 - Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa
 - Buku Data Tanah Di Desa
 - Buku Agenda
 - Buku Ekspedisi
- b. Administrasi Penduduk
 - Buku Data Induk Penduduk
 - Buku Data Mutasi Penduduk
 - Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan
 - Buku Data Penduduk Sementara
- c. Administrasi Keuangan
 - Buku Anggaran Penerimaan
 - Buku Pengeluaran Rutin
 - Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan
 - Buku Kas Umum
 - Buku Kas Pembantu Penerimaan
 - Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin
 - Buku Kas Pengeluaran Pembangunan
- d. Administrasi Pembangunan
 - Buku Rencana Pembangunan
 - Buku Kegiatan Pembangunan
 - Buku Inventaris Proyek
 - Buku Kader-Kader Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat

C. Tinjauan tentang Pengawasan Desa oleh Pemerintahan Kecamatan

1. Pengawasan

Dalam setiap organisasi pemerintahan pengawasan selalu dibutuhkan untuk melakukan pencegahan atau perbaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku. Menurut Hamdan (1989:153).

Pengawasan sebagai suatu proses pemantauan kegiatan untuk menjaga bahwa kegiatan tersebut memang dilakukan terarah dan menuju kepada pencapaian tujuan yang direncanakan dan mengadakan koreksi terhadap kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau kurang tepat sasaran yang dituju

Sedangkan menurut Bayu Swasta (1996: 216) "Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan". Dari pendapat yang ada pengawasan adalah keseluruhan dari kegiatan untuk menjamin atau mengusahakan agar semua pelaksanaan dapat berlangsung serta berhasil sesuai dengan yang direncanakan. Jika pengawasan tidak dilaksanakan kemungkinan kesalahan-kesalahan akan terulang.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi pemerintah kabupaten/kota, pers, dan masyarakat sipil kepada pemerintah desa yang ditujukan agar untuk menjamin agar pemerintah desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang undangan (Hanif Nurcholis, 2011: 155).

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
2. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sanksi diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut. Sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah baik peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sondang P. Siagian (1985: 100-101) mengemukakan asas-asas pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan yang telah ditetapkan.
2. Kecocokan metode dan teknik pengawasan dengan kebutuhan organisasi sendiri.
3. Dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi manajemen lainnya.
4. Cakupan untuk menyeluruh.
5. Penghematan penggunaan biaya.
6. Keterkaitan dengan pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi.
7. Pengurangan unsur subyektifitas dalam mengukur hasil yang dicapai.
8. Sifat pengawasan sesuai dengan sifat kegiatan yang diawasi.
9. Kemampuan mendeteksi penyimpangan sedini mungkin.
10. Orientasi kemasa yang akan datang.
11. Skala prioritas mendahulukan hal-hal yang mempunyai nilai strategis.
12. Keluwesan dalam pengawasan.
13. Objektivitas dalam melakukan pengawasan.
14. Pengembangan kegiatan pengawasan yang berlangsung terus menerus.

15. Efisiensi dalam melakukan pengawasan.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah kepada pemerintah desa atas penyelenggaraan pemerintah desa antara lain:

1. Administrasi pemerintahan desa.
2. Urusan pemerintahan desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah.
4. urusan pemerintah lain yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa (Hanif Nurcholis, 2011: 157).

Pengawasan yang dilakukan kecamatan adalah suatu proses atas penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintah desa berjalan dengan baik dan berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2006. Pengawasan yang dilakukan kecamatan bertujuan untuk menonitoring kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

2. Upaya Pemerintahan Kecamatan

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (1998: 1250) adalah usaha (daya) termasuk dalam kegiatan ini adalah segala bentuk daya yang ada dan telah dilaksanakan oleh lembaga untuk mencapai sasaran atau tujuan”. Jadi upaya menurut peneliti adalah usaha yang dilakukan dengan segala daya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan oleh suatu lembaga dalam membuat suatu kebijakan. Untuk mencapai sebuah tujuan maka dibuatlah rencana oleh para pejabat atau aparat pemerintah kecamatan, misalnya pembinaan administrasi desa. Kemudian upaya pemerintah kecamatan dalam hal ini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh aparat pemerintah kecamatan dengan segala daya yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan. Agar sebuah tujuan dapat tercapai maka

pemerintah kecamatan harus membuat suatu kebijakan yang berupa pemberdayaan.

Karena dalam penelitian ini penyusun hanya meneliti mengenai pembinaan dan pengawasan, khususnya administrasi desa, maka penyusun hanya mengambil upaya pemerintah kecamatan yang mengarah kepada pembinaan dan pengawasan administrasi desa. Sehingga dengan adanya upaya oleh suatu pemerintah kecamatan, mudah-mudahan administrasi desa yang ada di desa khususnya di bidang pemerintahan dapat tercapai dan terwujud dalam pembangunan masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera.

Menurut Josef Riwukaho dan Haryanto (1997:3) pengertian pemerintah menunjuk kepada orang atau alat perlengkapan sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan menunjuk kepada bidang tugas atau fungsi pemerintah. Pemerintah dan pemerintahan mempunyai dua arti, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah semua orang-orang, badan-badan atau lembaga-lembaga, alat-alat perlengkapan negara atau aparatur negara yang menjalankan berbagai macam kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya lembaga eksekutif saja. Kemudian mengenai pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisasi yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara, mengenai rakyat, penduduk dan wilayah negara demi tercapainya tujuan negara. Menurut H. Nurul Aini (1997: 29) pemerintah adalah suatu organisasi yang berwenang membuat peraturan yang mengikat seluruh penduduk

dalam wilayahnya dan melaksanakan, dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama Negara dan menyelenggarakan kekuasaan Negara.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa keberadaan pemerintah harus dilihat dari hadirnya seperangkat hukum yang berlaku secara sah dan adanya kekuasaan yang sah, untuk memaksa orang-orang di dalam wilayah mentaati peraturan. Sehingga dibutuhkan kemampuan membuat peraturan, tersedia perangkat dan adanya perilaku atau aparatur yang mengemban kewenangan dari lembaga-lembaga tersebut. Di dalam melaksanakan atau penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar atau baik tergantung kemampuan aparatur yang dapat dilihat dari hasil kerja atau usaha, seperti yang dikemukakan Kansil (Nurul Aini, 1997:35) setidaknya terdapat 3 fungsi yang mendorong tugas pemerintah yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi pengaturan, fungsi ini dilaksanakan dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat.
- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah yang dibebani kewajiban untuk meningkatkan upaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan.
- c. Fungsi pelayanan, fungsi ini dilaksanakan agar dapat diwujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya yang terdiri dari:
 1. Peningkatan kesejahteraan sosial, yaitu upaya membantu orang miskin, memelihara orang jompo, cacat, anak-anak terlantar, menampung dan menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif.
 2. Kebijakan ekonomi, dalam hal ini pemerintah bertugas menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, misalnya mengendalikan inflasi.
 3. Adanya tuntutan pemenuhan fasilitas dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan.
 4. Pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup dengan membuat penataan-penataan atau kebijakan-kebijakan yang menjamin pelestarian hidup.

Dengan uraian di atas dapat dilihat bahwa fungsi pemerintah cukup banyak dan semuanya itu ditunjukkan guna memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat sebagai warga negara tanpa pandang kelas dan besarnya imbalan yang diterima oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Menurut Pasal 126 ayat 1 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah. Pasal 222 ayat 4 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan dipimpin camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, selain itu menurut pasal 126 ayat 3 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yaitu sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

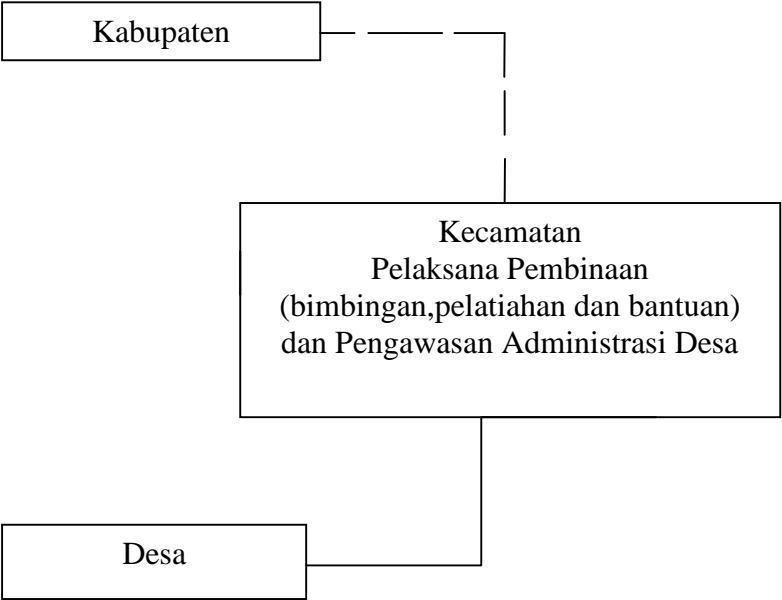
Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota. Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat kita ketahui bahwa suatu kecamatan di dalam undang-undang yang baru, bukan lagi sebagai wilayah administrasi pemerintahan melainkan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota yang diberi wewenang oleh bupati/walikota dalam menjalankan tugasnya aparat pemerintah kecamatan harus lebih memberi perhatian serius terhadap pembinaan administrasi kepada pemerintah desa.

D. Kerangka Berfikir

Penyelenggaraan administrasi desa diperlukan untuk mengetahui bagaimana jalannya sebuah pemerintahan di wilayah kecamatan. Administrasi desa merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintahan desa. Untuk penyelenggaraan administrasi desa dibutuhkan kemampuan yang sesuai dengan yang diharapkan. Dalam Penyelenggaraan administrasi diperlukan kemampuan perangkat desa dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan pemerintahan desa, maka untuk meningkatkan kemampuan yang sesuai dengan ketentuan maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah di atasnya yaitu pemerintahan kabupaten/kota. Kabupaten melimpahkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa kepada kecamatan. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh kecamatan berupa bimbingan, pelatihan dan bantuan kepada perangkat desa, selain itu kecamatan juga melakukan pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa.

Gambar 2: Skema Kerangka Berfikir



Keterangan:

- : Pelaksana pembinaan dan pengawasan
- ——— : Melimpahkan Pelaksanaan pembinaan dan pepengawasan